



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Setop Bahas Suntikan Modal Daerah

Sejumlah proyek prioritas pemerintah DKI terancam tertunda.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghentikan pembahasan penyertaan modal sekitar Rp 13 triliun untuk sejumlah perusahaan daerah. Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD, Santoso, menuturkan bahwa Dewan tak akan melanjutkan pembahasan permohonan suntikan modal sebelum revisi peraturan daerah tentang modal dasar BUMD selesai.

Revisi peraturan daerah tersebut, menurut Santoso, juga tak bisa dilakukan bersamaan dengan pengajuan penyertaan modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. "Harus *clear* dulu, jangan paralel," kata politikus Partai Demokrat itu ketika dihubungi *Tempo*, Jumat lalu.

Sekretaris Komisi Bidang Keuangan DPRD DKI, James Sianipar, menyatakan hal senada. Dia mengaku khawatir akan ada masalah di kemudian hari jika Dewan menyetujui permohonan penyertaan modal sebelum peraturan modal dasar direvisi. "Jangan dipaksakan, takutnya bermasalah secara hukum," tutur politikus NasDem itu.

Selain itu, James melanjutkan, pemerintah DKI dan sejumlah perusahaan daerah perlu menyelesaikan penyertaan modal yang masih belum digunakan. Jumlah suntikan modal

yang mengendap di sejumlah perusahaan daerah itu mencapai Rp 4,43 triliun.

Adapun Wakil Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD, Jhonny Simanjuntak, mengatakan pengendapan modal terjadi karena pemerintah DKI dan perusahaan daerah tidak memiliki kajian matang saat meminta suntikan modal. "Pemerintah DKI dan BUMD ini minta (suntikan modal) dulu, tapi aturannya sendiri belum disiapkan," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

PT Jakarta Propertindo merupakan salah satu BUMD yang mengusulkan peningkatan modal dasar daerah dari Rp 10 triliun menjadi Rp 30 triliun. Suntikan modal itu rencananya digunakan untuk mengerjakan proyek penugasan dari pemerintah DKI, seperti pengadaan lahan untuk program hunian tanpa uang muka dan pembangunan stadion.

Pemerintah DKI telah mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah untuk PT Jakarta Propertindo kepada Dewan.

Melalui pemerintah DKI, PT MRT Jakarta dan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya juga mengajukan revisi peraturan modal dasarnya. Dua perusahaan itu perlu merevisi aturan tersebut agar bisa mendapat suntikan modal baru melalui Rancangan APBD 2019.

Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha

Milik Daerah DKI Jakarta, Riyadi, sepakat dengan Dewan. Menurut dia, revisi peraturan daerah terkait dengan modal dasar harus diselesaikan terlebih dulu sebelum membahas penyertaan modal dalam Rancangan APBD 2019. "Jadi, ada dasar hukumnya," tuturnya.

Ihwal pengendapan modal dasar di sejumlah BUMD, Riyadi melanjutkan, pemerintah DKI akan menerbitkan peraturan gubernur untuk mengatur realokasi dana itu ke program lainnya. Agar payung hukumnya lebih kuat, pengalihan dana yang mengendap ke program lain juga akan disertakan dalam revisi peraturan daerah modal dasar perusahaan daerah.

Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Hani Sumarno, berharap revisi peraturan daerah terkait dengan modal dasar itu bisa segera rampung. "Permohonan penyertaan modal ini juga bertujuan untuk kepenfingan masyarakat, misalnya untuk membangun stadion," katanya. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Setop Bahas Suntikan Modal Daerah

Modal untuk Penugasan

Tambahan modal untuk sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta terganjal oleh aturan tentang modal dasar serta oleh sisa modal sebelumnya yang mengendap. Padahal, menurut Sekretaris Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Riyadi, tanpa suntikan modal tambahan, perusahaan daerah tak akan bisa melaksanakan program prioritas pemerintah DKI pada 2019. "Kalau uang (suntikan modal) enggak bisa masuk, proyek akan tertunda," ujar dia akhir pekan lalu.

Berikut ini program prioritas pemerintah DKI yang ditugaskan kepada sejumlah perusahaan daerah pada 2019:

PT Jakarta Propertindo



Saat ini tengah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyer-taan Modal Daerah untuk PT Jakarta Propertindo agar modal dasar bisa naik dari Rp 10 triliun

menjadi Rp 30 triliun. Draf revisi sudah di Dewan.

- Usul penyer-taan modal pada RAPBD 2019:
- Pembangunan stadion Rp 1,5 triliun.
- Pengadaan lahan untuk program hunian tanpa uang muka Rp 648 miliar.
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Rp 500 miliar.
- Membeli lahan bekas Kedutaan Besar Inggris Rp 500 miliar.
- Suntikan modal yang mengendap Rp 2,55 triliun.

PT MRT Jakarta



Saat ini tengah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyer-taan Modal Daerah pada MRT Jakarta agar modal dasar bisa naik dari Rp 14,6 triliun menjadi Rp 40,7 triliun. Draf revisi sudah di Dewan.

- Usul suntikan modal pada rancangan APBD 2019:
- Pembayaran proyek MRT fase I Rp 4,41 triliun.
- Suntikan modal yang mengendap Rp 494,3 miliar.

PD Pembangunan Sarana Jaya



Mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pem-bangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta agar modal dasar bisa bertambah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 10 triliun. Draf revisi masih

di eksekutif.

- Usul suntikan modal pada rancangan APBD 2019:
- Proyek Sentra Primer Tanah Abang Rp 3,07 triliun.
- Pengadaan tanah dan pembangunan hunian tanpa uang muka Rp 2,2 triliun.
- Suntikan modal yang mengendap Rp 66,7 miliar.